



KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PAPUA

Communication of Participative Development in Community Empowerment Programs in Papua

Indah Sulistiani¹

¹STIKOM Muhammadiyah Jayapura, Jln Abepantai No 25 Tanah Hitam Abepura, Jayapura Papua, 99351, Indonesia

*email koresponden: indahsulistiani175@gmail.com

Abstrak

Program pemberdayaan masyarakat di Papua akan berlangsung dengan baik manakala dalam pelaksanaannya didukung oleh partisipasi masyarakat secara aktif, dimana masyarakat sebagai pelaksana sekaligus penikmat dari hasil-hasil pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan melalui komunikasi yang efektif dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat komunikasi partisipatif dari analisis SEM menunjukkan nilai koefisien pengaruh positif dengan angka standarized loading factor sebesar 0,20. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi partisipatif akan semakin meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberdayakan dirinya.

Kata kunci: Komunikasi Pembangunan, Partisipatif, Program Pemberdayaan, Keberdayaan Masyarakat, Papua

Abstrac

The community empowerment program in Papua will run well if its implementation is supported by active community participation, where the community plays a role as implementer and beneficiary of the results of development. This study aims to see the extent of community participation in empowerment programs through effective communication and synergy with the parties involved in the implementation of community empowerment programs. The research location was conducted in Jayapura City and Jayapura Regency. The results showed that the level of participatory communication from the SEM analysis showed a positive influence coefficient value with a standardized loading factor of 0.20. This means that the higher the level of participatory communication, the better the community's ability to empower themselves.

Keywords: :Development Communication, Participatory, Empowerment Programs, Community Empowerment, Papua

PENDAHULUAN

Pencapaian keberdayaan masyarakat ditentukan peran aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Peran aktif masyarakat dapat ditumbuhkan melalui komunikasi efektif pada dialog atau musyawarah program guna menentukan tujuan yang hendak dicapai. Komunikasi menjadi efektif manakala bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan mengedepankan kesetaraan, integrasi dan interdependensi tanpa adanya unsur dominasi dan pemaksaan satu pihak kepada pihak yang lain.

Komunikasi efektif untuk komunikasi pembangunan pedesaan ditandai dengan partisipasi masyarakat, di mana masyarakat diberdayakan dengan informasi dan merupakan bagian dari identifikasi kebutuhan mereka, tantangan, rencana intervensi, implementasi, monitoring dan evaluasi di lingkungan yang kondusif untuk mereka mengambil isu-isu pembangunan ke tangan mereka sendiri. Dengan menjadi peserta aktif dan pemilik dari keseluruhan proses, berarti bahwa anggota masyarakat berhasil diajak untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi masalah pembangunan dengan cara mereka sendiri. Mereka juga dibuat untuk bertanggung jawab kepada inisiatif perkembangan yang ada (Chambers, 1996; Rasila & Mudau, 2012).

Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan pemberlakuan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Desentralisasi dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memberi kewenangan bagi daerah dan masyarakat secara luas dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik (sumber daya manusia). Pembangunan sumberdaya diharapkan mampu menjadikan kapasitas individu masyarakat menjadi lebih berdaya dalam mencapai kesejahteraan hidup secara mandiri. Sementara pembangunan non fisik menjadi sarana dalam

pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat yang berkualitas dan bermartabat.

Papua sebagai Provinsi paling timur di Indonesia merupakan daerah yang kaya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktanya angka kemiskinan masyarakat di Provinsi Papua menempati urutan pertama di Indonesia, dengan persentase 28,40 persen pada September 2015 dan mengalami peningkatan menjadi 28,54 persen pada Maret 2016 (<http://papua.bps.go.id>). Artinya bahwa, pembangunan yang dilakukan pemerintah masih belum sepenuhnya mampu membawa kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor baik internal seperti karakteristik masyarakat, status sosial, status ekonomi dan lain-lain. Faktor seperti kondisi geografi, penerapan kebijakan yang tidak sesuai kearifan lokal dan faktor lainnya.

(Zolfaghari, 2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa, partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Jika orang lokal memiliki sikap positif terhadap perubahan, tingkat keberhasilan program pengembangan masyarakat akan sedang. Jika ada kesenjangan yang signifikan antara sikap pemimpin dan masyarakat maka mungkin lebih sulit untuk memulai dan melaksanakan program dengan sukses. Tingkat keberhasilan program apapun akan lebih sedang jika kesenjangan sikap antara pemimpin dan orang-orang dalam komunitas diminimalkan. Oleh karena itu, lebih baik untuk menutup kesenjangan sepenuhnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pelaksanaan program pemberdayaan. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui penerapan komunikasi efektif dalam setiap tahapan program pemberdayaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat terutama dalam dialog atau musyawarah pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan

memberikan dampak terhadap berbagai faktor seperti: peningkatan kesadaran diri, saling ketergantungan diantara masyarakat, meningkatkan jaringan pertemanan, membuka wawasan atau pengetahuan, peningkatan kesejahteraan dan faktor lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana tingkat komunikasi partisipatif masyarakat pada pelaksanaan program pemberdayaan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam pencapaian keberdayaan masyarakat di Papua yang berdaya, mandiri dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian campuran (Mixed methods) atau metode kombinasi dengan pendekatan *sequential explanatory strategic*. (Creswell, 2009) pendekatan ini adalah pendekatan teknik kuantitatif dalam pencarian data dan analisis didukung oleh pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah survei dengan kuisioner kepada responden dan wawancara mendalam (depth interview) kepada narasumber. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dari pihak ketiga maupun data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakat sebagai responden penelitian yang berjumlah 300 orang dari populasi sebanyak 1.803 orang.

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang terdiri dari Distrik Abepura dan Distrik Sentani Timur dengan empat kampung yaitu Kampung Enggros, Kampung Nafri, Kampung Itakiwa dan Kampung Nolakla. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan teknik *cluster random sampling* dimana lokasi penelitian dianggap dapat mewakili karakteristik masyarakat yang heterogen yaitu masyarakat pesisir pantai dan masyarakat non pesisir pantai.

Penentuan sampel penelitian ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah kepala keluarga ditiap lokasi penelitian. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* menggunakan perangkat

lunak *microsoft excel*. Teknik kuantitatif dilakukan melalui survei dengan kuisioner yang dibagikan kepada responden. Sedangkan teknik kualitatif dilakukan dengan mengali data sekunder maupun informasi dari narasumber yang dianggap berkompeten untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis *Structure Equation Model* (SEM) dengan lisrell untuk melihat hubungan antar variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil, Pembahasan, Analisis

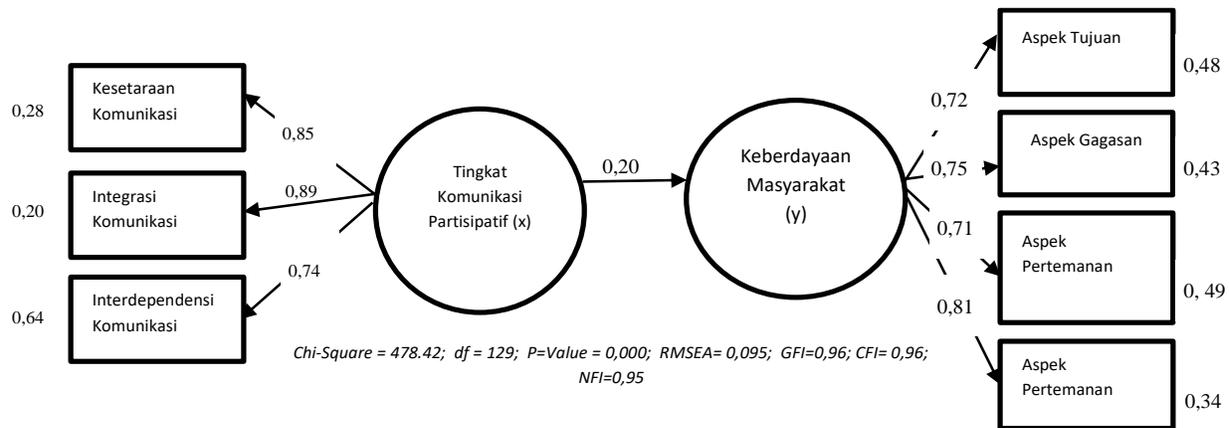
Komunikasi partisipatif merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh positif bagi peningkatan keberdayaan masyarakat berdasarkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil analisis SEM menunjukkan nilai koefisien pengaruh yang bertanda positif dengan angka *standarized loading faktor* sebesar 0,20. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat komunikasi partisipatif memberikan pengaruh positif terhadap tingkat keberdayaan masyarakat. Dalam artian bahwa, semakin tinggi tingkat komunikasi partisipatif masyarakat maka akan semakin meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberdayakan dirinya.

Hasil penelitian di lapangan menjelaskan keterlibatan masyarakat pada ruang-ruang dialog dalam program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya partisipatif baik kesetaraan komunikasi, integrasi komunikasi dan interdependensi komunikasi. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa kendala seperti: jadwal dialog yang kurang tersosialisasi dengan baik sehingga tidak semua masyarakat dapat hadir untuk ikut berdialog, rendahnya sharing informasi antara pendamping dengan masyarakat maupun kurangnya dukungan dari aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat bagi anggota masyarakat untuk terlibat dalam dialog. Keterbatasan individu masyarakat juga menjadi kendala dalam mencapai tingkat komunikasi yang partisipatif diantaranya: rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi,

status sosial, kurangnya pembinaan dan masalah lainnya.

Gambaran pengaruh tingkat komunikasi partisipatif terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.

komunikasi dan interdependensi komunikasi. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa kendala seperti: jadwal dialog yang kurang tersosialisasi dengan baik sehingga tidak semua masyarakat dapat hadir untuk ikut berdialog, rendahnya sharing



Gambar 1. Model Struktur (Standardized Loading Factor) Komunikasi Partisipatif terhadap Keberdayaan Masyarakat di Papua

(Sumber: Hasil olahan data primer, 2017)

Nilai positif faktor komunikasi partisipatif menggambarkan sejauhmana masyarakat dapat secara aktif berkomunikasi dalam setiap tahapan program pemberdayaan melalui ruang-ruang dialog yang tersedia. Tingkat komunikasi partisipatif dijabarkan oleh indikator-indikator: (1) kesetaraan dalam berkomunikasi, (2) integrasi dalam berkomunikasi, dan (3) interdependensi dalam berkomunikasi pada setiap tahapan program pemberdayaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat komunikasi partisipatif masyarakat yang tepat dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat yang semakin baik. Indikator integrasi sosial komunikasi merupakan indikator yang paling kuat merefleksikan peubah tingkat komunikasi partisipatif dengan nilai $\lambda = 0,85$, selanjutnya oleh indikator kesetaraan komunikasi dengan nilai $\lambda = 0,89$ dan indikator interdependensi komunikasi dengan nilai $\lambda = 0,74$.

Hasil penelitian di lapangan menjelaskan keterlibatan masyarakat pada ruang-ruang dialog dalam program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya partisipatif baik kesetaraan komunikasi, integrasi

informasi antara pendamping dengan masyarakat maupun kurangnya dukungan dari aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat bagi anggota masyarakat untuk terlibat dalam dialog. Keterbatasan individu masyarakat juga menjadi kendala dalam mencapai tingkat komunikasi yang partisipatif diantaranya: rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi, status sosial, kurangnya pembinaan dan masalah lainnya.

Penerapan Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan

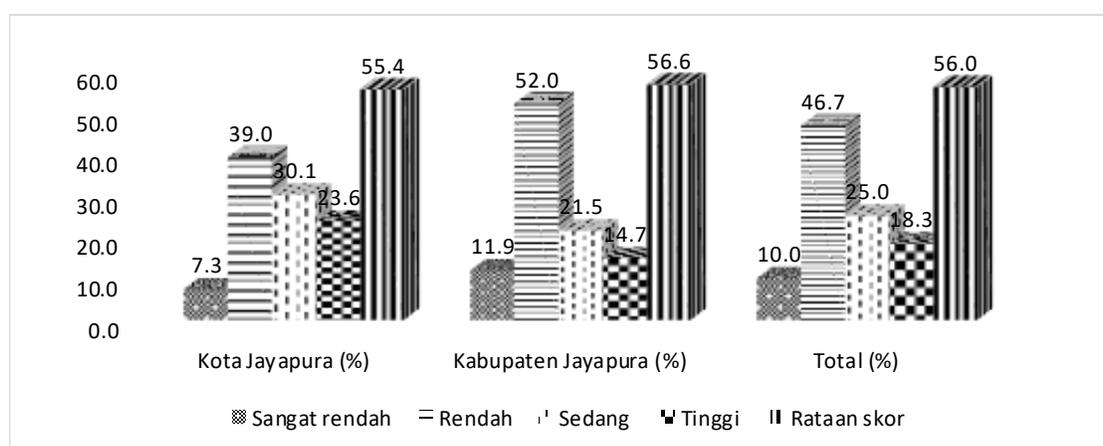
Komunikasi searah yang bersifat monologik (linier) pada pelaksanaan pembangunan merupakan komunikasi yang dilakukan untuk penyebaran informasi, inovasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pendekatan komunikasi monologik memiliki keterbatasan dimana masyarakat sebagai penerima informasi dianggap sebagai pihak yang pasif dan mengesampingkan partisipasi aktif masyarakat dalam berkomunikasi. Karenanya komunikasi dialogik (konvergen) memberi peluang

bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung menentukan sasaran pembangunan melalui penentuan gagasan pada dialog atau musyawarah pembangunan dengan mengedepankan dialog yang partisipatif dalam setiap tahapan kegiatan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tingkat komunikasi partisipatif tergolong rendah (rataan skor 56,0), kondisi ini disebabkan informasi yang disampaikan pemerintah melalui pendamping tidak terdistribusi secara baik pada pelaksanaan dialog atau musyawarah program, peluang atau kesempatan untuk menghadiri dialog yang tidak merata bagi semua warga, keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, keterbatasan individu masyarakat, peran pendamping yang belum maksimal dalam melakukan pendampingan pada saat

dan bertanggungjawab dengan tindakan yang dilakukannya. (Servaes, 2007) menegaskan bahwa, komunikasi untuk pembangunan bertumpu pada premis bahwa pembangunan berkelanjutan yang sukses membutuhkan partisipasi sadar dan aktif dari masyarakat penerima bantuan dimaksud pada setiap tahap proses pembangunan, dimana dalam analisis akhir pembangunan tidak dapat terjadi tanpa perubahan sikap dan perilaku di antara semua orang yang bersangkutan. Penerapan komunikasi partisipatif memungkinkan program untuk melakukan tugas mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif berdasarkan kebutuhan, keinginan dan spesifikasi lokal masyarakat.

Sebaran sampel pada kedua wilayah penelitian berdasarkan tingkat komunikasi partisipatif dapat



Gambar 2. Sebaran dan ratahan sampel Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura berdasarkan peubah tingkat komunikasi partisipatif

(Sumber: Hasil olahan data primer, 2017)

dialog atau musyawarah program dan lainnya.

(Chambers, 1996) mengungkapkan, efektivitas komunikasi untuk pembangunan pedesaan ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari identifikasi kebutuhan, rencana intervensi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Masyarakat menjadi peserta aktif dan pelaku dari keseluruhan proses pembangunan artinya bahwa masyarakat yang mengambil inisiatif dalam pengambilan keputusan

dilihat pada Gambar 2 berikut.

Analisis peubah komunikasi partisipatif berdasarkan sebaran sampel masing-masing indikator tergolong rendah yaitu indikator kesetaraan komunikasi (rataan skor 54,9), indikator integrasi komunikasi (rataan skor 55,9), dan indikator interdendensi komunikasi (rataan skor 57,3). Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat komunikasi partisipatif pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura dan Kota

Jayapura Papua belum dilakukan secara partisipatif berdasarkan indikator kesetaraan komunikasi, integrasi komunikasi dan interdependensi komunikasi.

(Aminah, 2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat komunikasi partisipatif masyarakat pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum mencapai tingkat komunikasi yang partisipatif. (Zolfaghari, 2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memberi kontribusi bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat tujuan dari pemberdayaan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat akan sulit dicapai.

Hasil penelitian di lapangan menjelaskan bahwa proses dialog atau musyawarah pada program pemberdayaan masyarakat belum partisipatif. Rendahnya tingkat komunikasi partisipatif disebabkan oleh kesetaraan yang rendah dimana tidak semua warga masyarakat dapat terlibat dalam dialog, integrasi atau keterpaduan antar sektor masih terjadinya ego sektoral dari masyarakat, dan rendahnya inderdependensi (ketidaksaling ketergantungan) diantara warga masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Indikator kesetaraan komunikasi dikedua wilayah penelitian tergolong rendah (rata-rata 54,9), kondisi ini menggambarkan bahwa dialog atau musyawarah pada kegiatan proram pemberdayaan belum memberikan kesetaraan yang sama bagi warga masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rendahnya kesetaraan komunikasi disebabkan oleh: tidak semua warga mendapat kesempatan untuk hadir, ketidakmampuan menyampaikan gagasan atau ide, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, perbedaan status sosial, intervensi dari pihak tertentu. Wawancara mendalam dengan narasumber terungkap bahwa, dominasi elit masih terjadi sehingga masyarakat kampung dengan tingkat pengetahuan yang rendah kurang mendapat kesetaraan. Usulan yang diakomodir seringkali usulan yang telah ditetapkan sebelumnya namun belum mendapatkan pendanaan karenanya dialog

atau musyawarah sebagai kegiatan formalitas. Rendahnya kesetaraan komunikasi disebabkan pula karakteristik individu seperti: pengetahuan rendah, usia lanjut, akses informasi yang terbatas, kemampuan berkomunikasi yang kurang baik. Upaya meningkatkan kesetaraan warga dalam dialog atau musyawarah perlu dioptimalkan agar peran masyarakat dalam dialog atau musyawarah semakin meningkat melalui penyebaran informasi yang lebih intensif, edukasi atau penyadaran, meminimalisir dominasi elit masyarakat sehingga partisipasi dapat lebih meningkat dalam dialog atau musyawarah pada setiap tahap kegiatan program.

Integrasi komunikasi pada dialog atau musyawarah program pemberdayaan masyarakat di Papua tergolong rendah (rata-rata skor 55,9) pada kategori rendah. Penelitian di lapangan menjelaskan bahwa, dialog atau musyawarah program belum mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Integrasi komunikasi pada dialog atau musyawarah program tercermin terutama pada rendahnya proses pembelajaran bersama, keterpaduan pengetahuan lokal dengan tenaga ahli dan menghargai gagasan dari pihak lain. Indikator integrasi komunikasi merupakan aspek yang penting dalam penerapan dialog atau musyawarah yang partisipatif. Disintegrasi kepentingan diantara anggota masyarakat, sikap egois, mau menang sendiri, acuh tak acuh dengan kepentingan pihak lain mewarnai proses dialog atau musyawarah demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Interdependensi komunikasi pada dialog musyawarah program sebaran sampel dominan rendah (rata-rata skor 57,3). Kondisi ini menggambarkan bahwa dialog atau musyawarah program mencerminkan ketidaksalingketergantungan diantara peserta dialog. Interdependensi komunikasi tercermin dari rendahnya rasa empati, saling mendukung, saling memperkuat, kurang percaya, kurang komitmen dalam tindakan yang dilakukan, dan dukungan bagi pihak lain untuk terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Hal ini terjadi disebabkan adanya kesenjangan diantara masyarakat

dalam pelaksanaan dialog atau musyawarah, dominasi elit masyarakat dan lainnya. Wawancara dengan responden menjelaskan bahwa proses dialog atau musyawarah seringkali diwarnai dengan pertentangan dan kericuhan dimana masing-masing pihak ngotot memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya dengan mengabaikan rasa empati terhadap kepentingan kelompok lain. Terlebih jika berhubungan dengan sejumlah dana bantuan biasa berujung konflik karena masing-masing pihak merasa paling benar dan harus didengar suaranya. Aspek interdependensi masyarakat dalam program pemberdayaan pada indikator komunikasi partisipatif menjadi kunci keberhasilan suatu program yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat. Interdependensi yang rendah dapat mempengaruhi ketidakstabilan kegiatan program pemberdayaan karena masing-masing pihak mengedepankan ego individu dan kelompok, kurang toleransi, saling menghargai, empati, saling percaya, dan saling mendukung untuk kepentingan bersama.

Wawancara narasumber di lapangan menjelaskan bahwa tingkat komunikasi partisipatif dalam program pemberdayaan tergolong rendah terutama dalam kesetaraan pada dialog atau musyawarah program. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal seperti keterbatasan prasarana dan sarana informasi menyebabkan tidak semua warga tahu kapan dilakukan dialog, kondisi geografis wilayah di Papua yang cukup beragam baik dari prasarana dan sarana transportasi. Kondisi sosial ekonomi warga masyarakat menyebabkan mereka merasa minder dan takut untuk hadir pada dialog. Warga masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kepemimpinan lokal menganggap kehadiran mereka cukup terwakili oleh tokoh adat setempat. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang narasumber di Kampung Itakiwa Kabupaten Jayapura.

“Kampung kami ada jauh dari kota jadi kadang susah dapat informasi apa yang pemerintah mau buat, tidak kenapa kalau dorang kepala suku yang wakili apa yang torang mau. Torang harus patuh dan mendengar apa yang kepala suku bilang, tra boleh buat macam-

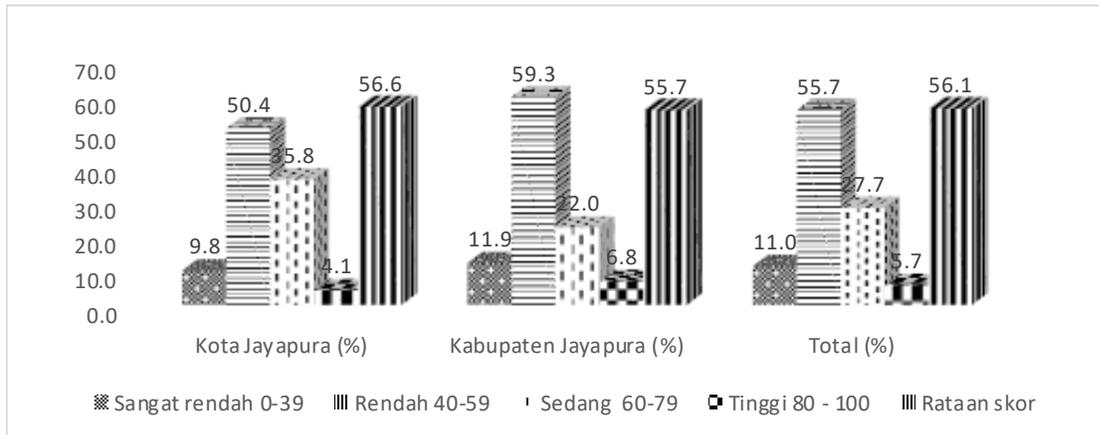
macam. Trada pendidikan jadi tra bae kalau ikut bicara-bicara macam orang pintar disana, terima saja. Banyak program juga torang trada berubah begini saja macam dulu”. (NP, 61 tahun)

Pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang partisipatif dalam program pemberdayaan menjadi penting agar partisipasi masyarakat meningkat. Tekanan struktur dalam lingkungan masyarakat adat membuat tidak semua warga masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk terlibat dalam dialog meski hal itu mereka terima secara sukarela atau keharusan. Kondisi ini membuat partisipasi masyarakat untuk hadir dalam dialog program pemberdayaan menjadi rendah akibatnya banyak usulan program hanya ditentukan oleh segelintir orang yang dianggap sudah mewakili masyarakat.

Keberdayaan Masyarakat

Tingkat keberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura dan Kotamadya Jayapura tergolong rendah (rata-rata 56,1). Tingkat keberdayaan masyarakat yang rendah terefleksikan pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan berusaha dan kemampuan kerjasama. Hasil penelitian di lapangan menggambarkan bahwa rendahnya keberdayaan masyarakat terlihat pada rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dalam mengakses informasi, pengambilan keputusan, kemampuan berusaha dan kemampuan bekerjasama. Kemampuan akses informasi yang rendah terutama pada pengetahuan tentang media atau saluran komunikasi dan keterampilan dalam memanfaatkan media komunikasi. Sebaran sampel menurut Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di Papua berdasarkan tingkat keberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3.

Penelitian di lapangan menjelaskan, masyarakat di Kota Jayapura memiliki rata-rata lebih tinggi dibanding kota Jayapura dimana masyarakat relatif lebih mudah mendapatkan akses informasi untuk menambah pengetahuan, lebih dekat dengan pusat pemasaran dan lainnya dibanding di Kabupaten Jayapura yang



Gambar 3. Sebaran dan rataan sampel menurut Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di Papua berdasarkan tingkat Keberdayaan Masyarakat

(Sumber: Hasil olahan data primer, 2017)

relatif lebih sulit mendapatkan fasilitas atau prasarana dan sarana. Sebaran sampel (Gambar 3) diatas terlihat bahwa sebaran sampel tergolong rendah pada peubah keberdayaan masyarakat di kedua wilayah penelitian. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang rendah untuk meningkatkan keberdayaannya.

Kemampuan akses informasi sebaran sampel sebagian berada pada kategori rendah (rataan 54,6). Artinya bahwa sampel memiliki kemampuan yang rendah dalam akses informasi terutama pada pengetahuan tentang media/saluran komunikasi dan keterampilan dalam memanfaatkan media komunikasi. Kondisi ini disebabkan beberapa hal seperti: minimnya pengetahuan tentang media informasi dan komunikasi, keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, lokasi yang jauh dari pusat kota, dan lainnya. Masyarakat yang berada di pedesaan atau kampung biasa mengandalkan sumber informasi langsung seperti aparat kampung, tokoh masyarakat dan adat, pendamping dan informasi dari kerabat, teman dan tetangga. Informasi tidak langsung melalui media baik cetak (koran, majalan) maupun elektronik (televisi dan internet) masih terbatas karena jaringan informasi dan telekomunikasi yang sulit dijangkau kecuali radio relatif mudah diakses. Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi tergolong rendah tercermin pada sikap (afektif) masyarakat yang

menilai akses informasi kurang penting bagi peningkatan kapasitas diri. Masyarakat tidak selalu merasa perlu *update* terhadap informasi, sebagai pendukung pekerjaan maupun meningkatkan daya saing. Pada aspek keterampilan (psikomotorik), mayoritas sampel belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung aktivitas sehari-hari. Sarana komunikasi dominan dimanfaatkan sebagai hiburan, ketimbang mencari informasi untuk peningkatkan kapasitas diri.

Kemampuan mengambil keputusan berada pada kategori rendah (rataan skor 58,7). Kondisi ini menggambarkan bahwa, kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan rendah terutama pada pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pengambilan keputusan Hasil penelitian diketahui bahwa, masyarakat Papua yang sangat kental dengan adat istiadat terbiasa hidup dalam koloni (kelompok) dengan mempercayakan tata aturan kehidupan masyarakat kepada pemimpin adat yang biasa disebut kepala suku atau kepala klen (Ondofolo/Onfoafi/Harsori/Iram). Berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat memberikan kepercayaan pengambilan keputusan kepada pemimpin adat. Pada aspek sikap (afektif) masyarakat sepakat, kemampuan pengambilan keputusan sangat penting sebagai bentuk aktualisasi dalam mengembangkan potensi diri. Pada aspek keterampilan (psikomotorik) sebagian besar

masyarakat belum memiliki keterampilan pribadi tercermin dari sulitnya menerima ide atau gagasan pihak lain, kurangnya pengetahuan atau informasi, lebih berorientasi kepentingan pribadi, tidak/belum mampu bernegosiasi, tidak antusias mereka dalam dialog, minim informasi, memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada tetua adat, kurang mampu bernegosiasi, dan kurang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan.

Kemampuan berusaha masyarakat tergolong rendah (rata-rata skor 55,4). Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat di kedua wilayah penelitian memiliki kemampuan usaha yang rendah dilihat dari indikator kognitif, afektif dan psikomotorik. Pengetahuan masyarakat dalam berusaha merupakan pengetahuan (kognitif) yang didasarkan pada pengetahuan secara turun-temurun. Pada aspek sikap (afektif) masyarakat sependapat bahwa kemampuan berusaha sangat penting agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, membuka peluang usaha, mempermudah akses permodalan, membuka jalur pemasaran, mengatasi persaingan. Pada aspek keterampilan (psikomotorik) masyarakat belum memiliki kemampuan dalam melakukan usaha secara modern dan profesional. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai merupakan nelayan yang mewarisi usaha orangtua, dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana. Masyarakat masih menerapkan pola pertanian subsisten dan meramu dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari baik dalam bercocok tanam, mencari ikan, melakukan sistem tanam berpindah untuk mencari kesuburan tanah dan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga harian.

Kemampuan membangun hubungan atau kerjasama berada pada kategori rendah (rata-rata skor 55,9). Kondisi ini menggambarkan bahwa, tingkat kemampuan sampel dalam membangun kerjasama kepada pihak lain yang berkaitan dengan peningkatan keberdayaan masyarakat masih tergolong rendah sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah pula. Masyarakat pedesaan di Papua kegiatan ekonomi sebagian masih berorientasi subsisten untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum berorientasi pasar yang dikelola profesional. (Purnaningsih, 2006) dalam penelitian tentang pola kemitraan mengungkapkan bahwa petani perlu melakukan kerjasama dalam pola kemitraan agar dapat menerima manfaat baik secara ekonomi, teknis dan manfaat sosial.

Penelitian di lapangan menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan kerjasama masyarakat tercermin dari pengetahuan (kognitif) yang rendah, tentang bagaimana membangun hubungan atau kerjasama dengan pihak lain secara profesional, kurang pemahaman tentang jejaring (networking), kurangnya pengetahuan dalam negosiasi. Pada aspek sikap (afektif) masyarakat cenderung menilai kerjasama sekedar untuk meningkatkan solidaritas dengan teman dan tetangga maupun pihak lain, belum sampai pada hubungan kerjasama untuk menunjang aktivitas atau pekerjaan secara profesional. Pada aspek keterampilan (psikomotorik) sebagian besar masyarakat menilai kemampuan kerjasama merupakan aktivitas yang memang harus dilakukan dalam lingkungan sosial masyarakat. Kondisi ini dimaklumi mengingat bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan merupakan orang-orang dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Kemampuan bekerjasama dimaknai sebagai ikatan kekeluargaan dengan sesama kerabat, silaturahmi dengan teman dan tetangga, serta hubungan karena adanya kepentingan yang sama dalam satu komunitas.

Wawancara dengan narasumber yang juga sebagai ondoafi menjelaskan bahwa membangun masyarakat di Papua bukan sesuatu yang mudah mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat di Papua terbagi dalam beberapa kelompok yaitu masyarakat yang kondisinya masih sangat tradisional yang hidup dengan meramu dan masyarakat modern yang sudah memiliki akses informasi dan modal yang cukup. Membangun masyarakat di Papua perlu adanya pemahaman tentang kondisi masyarakat secara baik agar dapat diaplikasikan melalui pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat. Berikut pernyataan dari narasumber yang juga tokoh adat di Kota Jayapura.

“Keberdayaan masyarakat menurut saya belum sepenuhnya terwujud, tugas pemerintah sebenarnya harus turun kampung, tapi sampai hari ini belum ada turun. Kita kadang kaget tiba-tiba ada program datang. Contoh mereka buat saluran air tapi tidak tahu itu ada kuburan disitu tapi mereka asal buat saja. Harusnya mereka datang dulu tanya masyarakat jangan menang sepihak. Bagaimana warga mau sejahtera kalau yang dibuat bukan maunya warga. Masih ada system kekuasaan yang dorang buat. Apapun yang dibuat harus ada musyawarah dan mufakat dengan masyarakat, jangan 1 atau 2 orang yang diajak bicara dianggap sudah mewakili masyarakat di kampung. Cara-cara ini musti diperbaiki oleh pemerintah, tidak bisa lagi rakyat hanya mendengar saja. Harus diajak bicara apa yang dorang mau buat untuk rakyat disini”. (GA, 66 tahun).

Pemahaman yang tepat akan kondisi masyarakat di Papua terutama masyarakat yang berada di kampung-kampung sebagai basis warga asli Papua, dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pencapaian tingkat keberdayaan masyarakat dapat tercapai apabila masyarakat mau dengan suka rela, menjadi kekuatan sosial untuk terlibat dalam pembangunan dalam mencapai suksesnya tujuan dari program pemberdayaan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat komunikasi partisipatif tergolong rendah, terutama pada kesetaraan komunikasi masyarakat belum mendapat kesempatan yang sama pada dialog atau musyawarah program, menyampaikan usulan atau masukan, terlibat dalam pengambilan keputusan, hambatan status sosial, intervensi dari pihak tertentu. Dominasi elit masih terjadi pada dialog atau musyawarah program, sehingga masyarakat kampung dengan tingkat pendidikan rendah sulit mengambil kesempatan. Tingkat keberdayaan masyarakat pada kategori rendah

terefeksikan pada kemampuan mengakses informasi, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan berusaha dan kemampuan menjalin hubungan. Rendahnya kemampuan individu masyarakat terutama pada kemampuan berusaha tercermin dari pengetahuan (kognitif) yang dilakukan secara subsisten dan meramu berdasarkan pengetahuan turun-temurun. Pada aspek sikap (afektif) masyarakat sependapat bahwa kemampuan berusaha sangat penting meningkatkan kesejahteraan keluarga, membuka peluang usaha, mempermudah akses permodalan, membuka jalur pemasaran, mengatasi persaingan secara aktif. Pada aspek keterampilan (psikomotorik) individu masyarakat tergolong rendah pada kemampuan berusaha secara modern dan profesional.

Keterlibatan masyarakat pada ruang-ruang dialog dalam program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya partisipatif. Kesetaraan komunikasi, integrasi komunikasi dan interdependensi komunikasi belum sepenuhnya terjadi, disebabkan oleh beberapa kendala seperti jadwal dialog yang kurang tersosialisasi dengan baik sehingga tidak semua masyarakat dapat hadir berdialog, kurangnya sharing informasi antara pendamping dengan masyarakat, serta rendahnya dukungan baik dari aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Keterbatasan individu masyarakat juga menjadi kendala dalam mencapai tingkat komunikasi yang partisipatif seperti: rendahnya tingkat pendidikan, kurang informasi, jaringan pertemanan yang terbatas, kesenjangan status sosial, keterbatasan akses informasi maupun keterbatasan lain yang membuat masyarakat sulit untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) yang telah memberikan hibah dana penelitian. Terima kasih penulis juga ucapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang telah memberikan izin

penelitian. Kepada narasumber dan responden atas partisipasinya dalam memberikan informasi dan data kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Aminah, S. (2012). *Model komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan petani kecil mewujudkan ketahanan pangan*. disertasi, Institute Pertanian Bogor, Bogor.
- Chambers, R. (1996). *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design. Qualitatif, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (3 ed.). (T. O. Yogyakarta, Penerj.) Pustaka Pelajar.
- Purnaningsih, N. (2006). *Adopsi Inovasi Pola Kemitraan Agribisnis Sayuran di Provinsi Jawa Barat*. disertasi, Institut Pertanian Bogor.
- Rasila B N and Mudau M J. . (2012). Effective communication as A Strategic Tool for Rural Development: A model to take South African Government beyond mobilization and consultation through public participation. *Journal of Media and Communication Studies*, 4(7), 134-141.
- Servaes, J. (2007). Harnessing the UN System Into a Common Approach On Communication for Development. *Journal Sage*, 483-507.
- Zolfaghari, A. (2009). The Factors Contributing to the Success of Community Learning Centers Program in Rural Community Literacy Development in the Islamic Republic of Iran: Case Studies of Two Rural Communities. *Proquest Journal, Asian Culture and History*, 1(2), 103-107.